



Buletin Triwulanan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI

Dari Redaksi

“MEN SANA IN CORPORE SANO”

“Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat,” begitulah arti dari judul di atas. Ketika tubuh kita terasa sehat dan bugar, pikiran kita pun dapat berfikir jernih sehingga apapun yang kita inginkan dapat tercapai. Rajin berolahraga dan berperilaku hidup sehat merupakan sarana yang tepat untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat.

Kesehatan merupakan harta yang paling berharga dan sepatutnya harus kita jaga. Jika lalai, tidak sedikit biaya yang harus kita keluarkan agar kembali sehat. Bagi yang kaya, biaya pengobatan tersebut mungkin bukan masalah. Namun bagi masyarakat miskin dan kurang mampu, biaya tersebut dapat menjadi momok yang menakutkan dan bahkan dapat memperparah kondisi kesehatan.

Kalau begitu, apakah hak untuk sehat hanya monopoli kaum jet set yang berobat saja harus keluar negeri? Lalu, bagaimana dengan masyarakat miskin, apakah mereka tidak berhak mendapat jaminan kesehatan?

Ternyata pemerintah kita tidak menutup mata melihat nasib golongan masyarakat terpinggirkan ini. Lewat program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang dikelola Departemen Kesehatan bekerjasama dengan PT Askes, hak masyarakat miskin dan kurang mampu untuk memperoleh jaminan kesehatan setidaknya tercukupi. Agar program mulia tersebut dapat terus terselenggara dan menjadi lebih baik lagi ke depannya Badan Pemeriksa Keuangan, pada triwulan ke-3 ini akan mengevaluasinya.

Sebenarnya ada satu cara mudah yang lain untuk menjaga kesehatan, yaitu dengan berpuasa. Rasulullah SAW pernah bersabda, “*Berpuasalah, maka kamu akan sehat.*”

Berhubung bulan ini merupakan bulan Ramadhan, segenap kru Eboni mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadah puasa kita di bulan yang suci ini diterima oleh-Nya.

Daftar isi

TAJUK UTAMA	1
FOKUS	2
• Trend Opini Entitas Sulteng	2
TINJAUAN YURIDIS	3
KEGIATAN PERWAKILAN	4
PROFIL KITA	7
TIPS	7
HUMOR	7
SELAMAT YAA	8
GALERI FOTO PERWAKILAN	8

Tajuk Utama

WDP vs Disclaimer = 3 : 4

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI serahkan tujuh LHP LKPD



Palu-Eboni. (Dari kiri ke kanan), Kepala Perwakilan Provinsi Sulteng BPK RI, Dadang Gunawan, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Tojo Unauna kepada Ketua DPRD Tojo Unauna, Masri Latanipa (29/6) dan LHP atas LKPD Kota Palu kepada Ketua DPRD Palu, HM. Sidik Ponulele (10/7). Penyerahan dilakukan di Aula Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI.

PALU - Eboni

Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan Jum'at (10/7) telah menyerahkan seluruh laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2008 kepada tujuh entitas yang telah selesai diperiksa. Acara penyerahan atas LHP dilaksanakan di Aula Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI.

Penyerahan LHP atas LKPD dilakukan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, **Dadang Gunawan** atas enam pemerintah kabupaten dan satu pemerintah kota kepada masing-masing Ketua DPRD dan Bupati/Walikota.

Adapun ketujuh entitas tersebut adalah Kabupaten Donggala diserahkan (19/6), Kabupaten Parigi Moutong diserahkan (22/6), Kabupaten Buol diserahkan (22/6), Kabupaten Tojo Unauna diserahkan (29/6), Kabupaten Tolitoli diserahkan (30/6), Kota Palu diserahkan (10/7), dan Kabupaten Banggai Kepulauan diserahkan (10/7).

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberikan oleh BPK kepada Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Unauna, dan Kabupaten Tolitoli. Sedangkan sisanya mendapatkan opini *disclaimer*. Hal tersebut terjadi karena total nilai

temuan pemeriksaan atas tiga kabupaten dan satu kota tersebut melebihi nilai *Torelable Error (TE)*.

LHP BPK juga memuat temuan SPI Kabupaten Donggala sebanyak 8 dan kepatuhan sebanyak 11 temuan dengan pembatasan lingkup antara lain aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya dan persediaan tidak dapat ditelusuri. Untuk Kabupaten Buol sebanyak 6 temuan SPI dan 22 temuan kepatuhan dengan pembatasan lingkup antara lain permasalahan panjang yang belum selesai, aset tetap tidak dapat diyakini kewajarannya, dan terdapat selisih saldo buku yang tidak dapat dijelaskan dan ditelusuri.

Untuk Kota Palu, LHP BPK memuat 4 temuan SPI dan 15 temuan kepatuhan dengan pembatasan lingkup antara lain terdapat 70 SKPD belum menyusun laporan keuangan dan penyertaan modal pemerintah kota kepada PT CNE tidak didasarkan atas Perda. Sementara itu Kabupaten Banggai Kepulauan dalam LHP BPK dimuat 6 temuan SPI dan 10 temuan kepatuhan dengan pembatasan lingkup antara lain saldo aset tetap mengalami penurunan signifikan karena terdapat aset hasil pengadaaan tahun sebelumnya tidak dilaporkan, saldo persediaan tidak dapat diyakini kewajarannya, dan laporan keuangan SKPD belum disusun. (agt)

Fokus

Mengapa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dibutuhkan?

Sampai masa sekarang masih banyak anak-anak bercita-cita ingin menjadi seorang dokter. Cita-cita ini bukan hanya cita-cita anak-anak saja tapi seringkali juga merupakan cita-cita orang tua lebih dari cita-cita anak-anak itu sendiri. Di negara-negara yang sudah maju sekalipun seperti misalnya di Amerika, profesi dokter masih merupakan salah satu profesi favorit selain profesi pengacara.

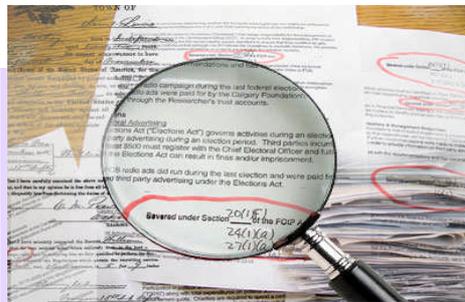
Apa sebetulnya yang menjadi sebab mengapa profesi dokter di Indonesia juga masih menjadi profesi idaman?

Alasan klasik ideal yang dulu sering dikemukakan adalah berhubungan dengan profesi sentral dokter dalam masyarakat tradisional maupun masyarakat modern. Dokter mempunyai peran sosial sebagai penyembuh dimana banyak orang sakit menggantungkan harapan penyembuhan kepadanya.

Alasan lain yang sering tak dikemukakan adalah berkaitan dengan status sosial dan kemapanan seorang dokter. Meski tidak semuanya bernasib demikian, dalam berbagai contoh, dokter adalah komunitas masyarakat profesi yang menggiurkan status sosialnya karena transaksi yang khas dalam pelayanan kesehatan.

Tapi memang ada yang unik dalam transaksi pelayanan kesehatan antara dokter selaku pemberi jasa pelayanan kesehatan dengan pasien selaku klien. Setidak-tidaknya ada 3 (tiga) hal yang khas sebagai karakteristik pelayanan kesehatan yang mempengaruhi hubungan dokter-pasien.

Yang pertama adalah sifat ketidakpastian (*uncertainty*) dari resiko sakit itu sendiri. Datangnya suatu penyakit bisa tiba-tiba dan diluar dugaan. Keadaan ini akan



menyebabkan kebutuhan pembiayaan kesehatan yang mendadak dan seringkali dalam jumlah besar yang memberatkan. Meskipun banyak dokter selaku provider juga peduli akan biaya pelayanan kesehatan ini, tapi sifat ketidak-pastian ini dapat pula dimanfaatkan secara sepihak untuk kepentingan yang menguntungkan pemberi jasa pelayanan kesehatan (dokter) itu sendiri.

Karakteristik yang kedua dalam transaksi pelayanan kesehatan adalah kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang amat tidak elastis (*inelastic*). Ketika seseorang sakit, apalagi pada kasus kasus yang sifatnya penyelamatan nyawa (*life saving*), tuntutan inelastisitas dari kebutuhan pelayanan kesehatan itu akan mendorong orang untuk mengorbankan apa saja untuk kesembuhan dirinya, meski pelayanan kesehatan yang canggih kerap kali akan membutuhkan biaya yang amat besar. Sifat in-elastisitas, yakni sesuatu yang tidak dapat ditunda pada pihak klien yakni pengguna jasa pelayanan kesehatan dapat pula dimanfaatkan oleh pemberi pelayanan kesehatan (dokter) secara salah untuk kepentingannya.

Karakteristik lain dari transaksi pelayanan kesehatan adalah adanya ketidak-seimbangan informasi dari pihak pemberi jasa pelayanan kesehatan (dokter) terhadap

pengguna jasa pelayanan kesehatan/klien/pasien (*information asymmetry*).

Informasi tentang bagaimana pelayanan pengobatan untuk menyembuhkan suatu penyakit hanya dikuasai dan dipahami oleh pemberi jasa pelayanan kesehatan (dokter). Dengan demikian karena ketidapahamannya pasien pasrah menyerahkan sepenuhnya upaya penyembuhan kepada dokter. Dokter yang menentukan semua upaya yang perlu dilakukan untuk penyembuhan seorang pasien. Kebutuhan akan pelayanan kesehatan (*demand*) dengan demikian tidak ditentukan oleh pengguna jasa tetapi oleh provider. Keadaan ini sering mendorong apa yang disebut sebagai *supply induce demand*. Artinya pemberi jasa pelayanan (dokter) dapat melakukan dorongan penggunaan pelayanan yang berlebihan, tidak sesuai standar dan induksi-induksi lainnya, dan pasien dalam keterbatasan pemahamannya menyerah pada induksi-induksi penggunaan pelayanan kesehatan yang tak perlu dan berlebihan karena menguntungkan dokter dari sisi ekonomis.

Dari uraian di atas, ketiga karakter pelayanan kesehatan yang khas itu mutlak perlu diintervensi agar terjadi kendali biaya dan kendali mutu. Disamping standarisasi pelayanan kesehatan, protokol pengobatan, bagian yang juga penting adalah metode pembayaran pada pemberi jasa pelayanan (dokter). Apabila dokter diikat dalam suatu kerjasama dengan pembayaran prospektif atau *pre payment* lainnya (*kapitasi, budget system, DRG, dll*) maka diharapkan induksi-induksi terhadap pelayanan kesehatan yang seringkali dimanfaatkan untuk keuntungan pemberi jasa pelayanan (dokter) tapi seringkali memberatkan pasien/klien tidak akan terjadi.

Sumber: <http://www.jpkm-online.net>

TREND OPINI ATAS PENYAJIAN LKPD ENTITAS DI WILAYAH SULAWESI TENGAH 3 TAHUN TERAKHIR

Pada akhir semester I Tahun 2009 yang lalu, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI telah menyelesaikan Pemeriksaan atas LKPD pada 11 entitas di wilayah Sulawesi Tengah. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa LKPD telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD memuat opini, dimana berdasarkan Pasal 16 UU No. 15 Tahun 2004 terdiri dari 4 jenis opini yakni wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP).

Pengamatan terhadap trend opini yang telah diberikan kepada 11 entitas di wilayah Sulawesi Tengah selama 3 Tahun Anggaran (TA) terakhir yakni TA 2006, 2007 dan 2008 menunjukkan adanya penurunan kualitas opini secara totalitas. Penurunan kualitas opini tersebut dapat disebabkan oleh berbagai kemungkinan. Dapat berasal dari pihak Pemda/entitas sendiri yang tidak ada komitmen untuk memperbaiki proses pengelolaan keuangan daerah, lemahnya proses pembinaan dan

pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah, atau bisa jadi dari pemeriksa BPK sendiri yang masih belum konsisten dalam melaksanakan pemeriksaan. Hal ini perlu dikaji ulang dalam rangka menciptakan tata kelola keuangan daerah/negara yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. (***)

Data opini LKPD entitas Sulawesi Tengah 3 TA terakhir:

Entitas	OPINI			Trend
	TA 2006	TA 2007	TA 2008	
Prov. Sulawesi Tengah	TMP	WDP	WDP	Naik
Kota Palu	WDP	WDP	TMP	Turun
Kab. Donggala	TMP	TMP	TMP	Tetap
Kab. Toli-Toli	WDP	WDP	WDP	Tetap
Kab. Buol	WDP	TMP	TMP	Turun
Kab. Parigi Moutong	WDP	WDP	WDP	Tetap
Kab. Poso	WDP	WDP	TMP	Turun
Kab. Morowali	TMP	TMP	TMP	Tetap
Kab. Tojo Unauna	WDP	TMP	WDP	Naik
Kab. Banggai	WDP	WDP	WDP	Tetap
Kab. Banggai Kepulauan	TMP	TMP	TMP	Tetap

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PROGRAM JAMKESMAS

TAHUN 2008



Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang diselenggarakan secara nasional, agar terjadi subsidi silang dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin.

Pelaksanaan program Jamkesmas dilaksanakan sebagai amanah Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Selain itu berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Dasar hukum penyelenggaraan program Jamkesmas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Program Jamkesmas sebenarnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah sejak tahun 2005 dengan meluncurkan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang dikenal dengan nama program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin). Program ini dilaksanakan oleh PT Askes. Pada tahun 2008, program Askeskin berubah nama menjadi program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Hal ini mengingat adanya perubahan pengelolaan penyelenggaraan berupa pemisahan fungsi pengelola dengan fungsi pembayaran, yang didukung dengan penempatan tenaga verifikator di setiap rumah sakit. Dengan pertimbangan untuk mengendalikan

pelayanan kesehatan, peningkatan mutu, transparansi dan akuntabilitas serta mengingat keterbatasan pendanaan, maka pengelolaan program Jamkesmas Tahun 2008 dilakukan langsung oleh Departemen Kesehatan. Adapun mekanisme pelaksanaan program Jamkesmas tahun 2008 sebagai berikut:

Kepesertaan Jamkesmas

Peserta Program Jamkesmas adalah setiap orang miskin dan tidak mampu yang terdaftar dan memiliki kartu dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Bupati/Walikota wajib menetapkan peserta Jamkesmas Kabupaten/Kota dalam satuan jiwa berisi nomor, nama dan alamat peserta dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota. Untuk administrasi kepesertaan Departemen Kesehatan menunjuk PT Askes (Persero), dengan kewajiban melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Data peserta yang telah ditetapkan Pemda, kemudian dilakukan entry oleh PT Askes untuk menjadi database kepesertaan di Kabupaten/Kota;
2. Berdasarkan database tersebut kemudian kartu diterbitkan dan didistribusikan kepada peserta;
3. PT Askes menyerahkan kartu kepada peserta berdasarkan penetapan Bupati/Walikota dengan tanda terima yang sah dari peserta/anggota keluarga peserta;



4. PT Askes melaporkan hasil pendistribusian kartu peserta kepada Bupati/Walikota, Gubernur, Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta rumah sakit setempat.

Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Setiap peserta Jamkesmas berhak mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan (RJ) dan rawat inap (RI), serta pelayanan kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL) dan pelayanan gawat darurat pada masing-masing Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dalam hal ini Puskesmas, rumah sakit (RS),

Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (BBKPM), dan lainnya. Dalam pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas dilakukan verifikasi. Verifikasi adalah kegiatan penilaian administrasi klaim yang diajukan PPK yang dilakukan oleh Pelaksana Verifikasi dengan mengacu kepada standar penilaian klaim. Tujuan dilaksanakannya verifikasi adalah diperolehnya hasil pelaksanaan program Jamkesmas yang menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu. Verifikasi Program Jamkesmas meliputi: verifikasi administrasi kepesertaan, administrasi pelayanan dan administrasi keuangan.

Pendanaan Program Jamkesmas

Sumber Dana berasal dari APBN sektor Kesehatan Tahun Anggaran 2008 dan kontribusi APBD. Pemerintah daerah berkontribusi dalam menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di daerah masing-masing. Dana yang digunakan untuk penyelenggaraan Program Jamkesmas merupakan dana bantuan sosial dimana dalam pembayaran kepada rumah sakit dalam bentuk paket, dengan berdasarkan klaim yang diajukan dan peserta tidak boleh dikenakan iuran biaya dengan alasan apapun.

Bantuan sosial tersebut direalisasikan dalam bentuk Jaminan Kesehatan yang penyelenggaraannya dalam skema asuransi sosial. Pemerintah menggunakan dana yang berasal dari APBN untuk membayar premi peserta.

Untuk penyelenggaraan di masa yang akan datang, perlu dilakukan kajian apakah program ini dapat dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Dengan menggunakan sistem pengelolaan keuangan BLU, tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat dapat tercapai. (wwn)



Pemeriksa BPK Jangan Takut Jadi Ahli Di Pengadilan



(ki-ka : Deddy Eriantono, Dadang Gunawan)

Pemeriksa BPK khususnya di lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, harus siap dan jangan takut jika diminta keterangan sebagai ahli di persidangan. Hal tersebut ditegaskan Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, **Dadang Gunawan**, dalam pembukaan Diklat Teknik Beracara dan Pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan, di Aula Perwakilan, Senin (22/6).

“Banyak temuan pemeriksaan BPK yang berindikasi pidana dan/atau tindak pidana korupsi digunakan oleh para penegak hukum sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan di pengadilan. Oleh sebab itu, kita sebagai Pemeriksa BPK, yang mempunyai kapasitas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, sewaktu-waktu harus siap jika diminta untuk memberikan Keterangan sebagai Ahli,” kata Dadang Gunawan dihadapan seluruh peserta diklat.

Menurut Dadang, yang kini menjadi persoalannya adalah adanya kecenderungan para pemeriksa yang enggan ataupun takut ketika diminta memberikan Keterangan sebagai Ahli di pengadilan. Keengganan dan ketakutan para pemeriksa tersebut sebenarnya lebih dikarenakan ketidaktahuan atas proses/teknis beracara di pengadilan maupun hal-hal mengenai pengetahuan hukum terkait pemberian Keterangan Ahli.

Atas permasalahan tersebut, Sub Bagian Hukum dan Humas Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai teknik beracara dan memberikan keterangan ahli di pengadilan. Diklat tersebut diadakan selama 3 hari, dimulai Senin (22/6) dan berakhir Rabu (24/6).

Diklat yang memang ditujukan bagi pemeriksa tersebut diikuti oleh 52 orang pemeriksa yang saat ini bertugas di lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI.

Hadir sebagai pemateri dalam diklat tersebut yaitu akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Hakim dari Pengadilan

Tinggi Sulteng, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, dan Konsultan dari Jakarta.

Selain mendapatkan teori mengenai teknik beracara dan kiat memberikan keterangan ahli di pengadilan, peserta diklat juga diajak untuk melihat video contoh jalannya persidangan suatu perkara tindak pidana korupsi yang menghadirkan 2 orang ahli. Pemutaran video ini bertujuan agar pemeriksa BPK tidak hanya sekedar mendapat teori tetapi juga mengetahui bagaimana kondisi sesungguhnya pada suatu persidangan.

Kepala Perwakilan berharap, dengan diselenggarakannya diklat ini setidaknya para pemeriksa di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah mengetahui teknik beracara dan memberikan keterangan ahli di pengadilan sehingga jika nantinya diminta menjadi ahli di pengadilan, pemeriksa sudah siap, berani dan tidak takut lagi. (***)



Percaya Diri, Kunci Menjadi Ahli Di Persidangan

Apakah kunci sukses bagi seorang pemeriksa ketika diminta menjadi ahli di persidangan? PeDe atau percaya diri jawabannya. Hal tersebut terungkap dalam Diklat Teknik Beracara dan Pemberian Keterangan Ahli yang diadakan oleh Sub Bagian Hukum dan Humas, di Aula Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, Senin (22/6).

Menurut salah satu pemateri dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako, **Nasrum, S. H., M. H.**, kebanyakan orang jika diminta memberikan keterangan ahli di pengadilan umumnya takut dan menjadi tidak percaya diri, tidak terkecuali orang dengan latar belakang ilmu hukum. Apalagi jika hal tersebut merupakan pengalaman pertama kali. Untuk mengatasi masalah tersebut, seseorang harus punya kepercayaan diri yang tinggi selain mempunyai bekal pengetahuan tentang teknik beracara yang cukup.

“Jika kita diminta untuk memberikan keterangan ahli di pengadilan jangan takut. Percaya diri saja. Bapak ibu diminta hadir sebagai ahli di pengadilan karena dianggap menguasai bidang yang bapak ibu geluti, jadi tidak perlu khawatir,” ujar Nasrum dihadapan peserta diklat.

Pemeriksa yang memberikan keterangan ahli juga harus menguasai permasalahan yang sedang disidangkan, jika perlu bawalah data pendukung seperlunya. Jawablah pertanyaan hakim, jaksa maupun pengacara dengan mantap penuh keyakinan dan jangan plin plan. Seandainya pemeriksa tidak mengetahui tentang sesuatu hal yang ditanyakan oleh hakim, jaksa maupun pengacara jawablah tidak tahu dan jangan pernah sekalipun berbohong.

Diklat Teknik Beracara dan Pemberian Keterangan Ahli di Pengadilan diikuti oleh pemeriksa di lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI dan dibuka oleh Kepala Perwakilan, Dadang Gunawan, Senin (22/6), di Aula Perwakilan.

Diklat yang berlangsung sampai Rabu (24/6) ini menghadirkan pemateri dari Fakultas Hukum Universitas Tadulako yaitu **Dr. Jubair, S.H, M.Hum, Dr. Abdul Wahid, S.H, M.H, Nasrum, S.H, M.H,** Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Sulteng yaitu **Heru Mulyono, S.H, M.H, Efran Basuning, SH, M.Hum,** Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulteng **Didik Darmanto, S.H, M.H** dan Konsultan dari Jakarta yang sering diminta menjadi ahli di persidangan, **Deddy Eriantono, S. E., M. Sc., Ak., CFE.** (***)



Diklat Teknik Penulisan Laporan Pemeriksaan Tidak Gampang Menulis Laporan Pemeriksaan

Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, **Dadang Gunawan**, di Aula Perwakilan, Senin (8/6), membuka Diklat Teknik Penulisan Laporan Pemeriksaan yang diikuti pemeriksa di lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Minimnya pengetahuan pemeriksa BPK mengenai teknik penulisan yang informatif, akurat dan sesuai



dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) menjadi latar belakang diselenggarakannya diklat tersebut.

“Kalau sekedar menulis laporan pemeriksaan itu gampang, tetapi menulis laporan pemeriksaan yang efektif, efisien, informatif dan sesuai dengan EYD, itu tidak gampang. Masih banyak pemeriksa ketika menulis laporan pemeriksaan belum memperhatikan kaidah-kaidah berbahasa yang benar,” ujar Dadang Gunawan ketika memberikan sambutan pembukaan dihadapan peserta diklat.

Menurut Kepala Perwakilan, waktu penyelenggaraan diklat teknik penulisan laporan pemeriksaan ini sudah tepat karena bersamaan dengan jadwal kepulangan tim pemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2008 dan bersamaan pula dengan waktu penyusunan laporan pemeriksaan.

Pemilihan waktu penyelenggaraan diklat yang bersamaan waktunya dengan jadwal kepulangan tim pemeriksa LKPD, menurut Kepala Perwakilan, memang disengaja.

Tujuan diselenggarakannya Diklat Teknik Penulisan Laporan Pemeriksaan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemeriksa dalam penulisan laporan pemeriksaan yang informatif dan akurat. Selain itu juga untuk membantu pemeriksa menguasai teknik penulisan laporan yang efektif.

“Saya berharap setelah diklat ini, pemeriksa di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menguasai teknik penulisan laporan pemeriksaan yang efektif. Selain itu dengan adanya diklat ini saya menginginkan adanya sebuah panduan mengenai pola penulisan laporan pemeriksaan sehingga antara tim yang satu dengan tim yang lain tidak terdapat perbedaan dalam penulisan laporan pemeriksaan,” kata Dadang.

Diklat Teknik Penulisan Laporan Pemeriksaan ini menghadirkan pemateri lokal dari Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Kepala Seksi Sulteng IIB, **I Kadek Suartama, S. E., M. Ak., Ak.** (ron)

Mencari Hikmah Di Balik Peristiwa Isra Mi'raj



(Foto kiri : keheningan tercipta saat dikumandangkannya ayat suci Al Qur'an

Foto kanan : Sambutan Kepala Perwakilan)



Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, Selasa (28/7), menyelenggarakan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 27 Rajab 1430 H atau Senin (20/7), di Aula Perwakilan. Peringatan tersebut mengambil tema “Melalui Hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Kita Tingkatkan Integritas, Independensi dan Profesionalisme Dalam Mengemban Tugas Pokok BPK RI.”

Kepala SMP Negeri 3 Palu, **Drs. H. M. Yusuf Jambolino** diundang untuk memberikan siraman rohani kepada pemeriksa yang bertugas di lingkungan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan gaya santai diselingi gurauan segar, Yusuf menguraikan hikmah di balik peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang terjadi lebih dari 1000 tahun lalu.

“Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj. Melalui Isra Mi'raj kita diperlihatkan betapa Maha Kuasanya Tuhan yang mampu memperjalankan hambanya dari satu tempat ke tempat lain yang jaraknya ribuan bahkan jutaan kilometer hanya dalam waktu semalam dengan mengendarai Buroq yang kecepatannya berpuluh kali lipat kecepatan kilat,” jelas Yusuf.

Akan tetapi hikmah terbesar dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut adalah perintah menjalankan sholat lima waktu sehari semalam. Sholat merupakan tiang agama dan dari sholat itulah kita dapat melihat kualitas pribadi seseorang. Seseorang yang rajin dan khusyuk dalam sholat akan tercermin dari perbuatan sehari-hari, imbuh Yusuf.

Akhlah terpuji seperti itulah yang seharusnya ada dan diteladani oleh setiap pemeriksa BPK karena sifat tersebut sesuai dengan visi dan misi BPK yang mengedepankan integritas, independensi dan profesionalisme. Hikmah lain dalam Isra Mi'raj yang bisa diteladani oleh pemeriksa yaitu tanggung jawab. Unsur ini penting untuk dimiliki setiap pemeriksa karena tugas utama BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW merupakan kegiatan keagamaan yang rutin diselenggarakan oleh Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, **Dadang Gunawan**, dalam sambutan pembukaan mengatakan, kegiatan keagamaan semacam ini merupakan hal yang positif dan harus didukung.

“Siraman rohani semacam ini sangat penting. Selama ini kita mungkin terlena dengan kesibukan bekerja dan lupa bahwa jiwa kita juga butuh penyegaran karena dalam hidup ini harus ada keseimbangan. Saya mendukung kegiatan semacam ini dan semoga di waktu mendatang bisa diselenggarakan kembali,” kata Dadang.

Sesuai dengan tema kegiatan, Dadang berharap, setiap pemeriksa dapat mengambil hikmah dari peristiwa agung ini dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga independensi, integritas dan profesionalisme seorang pemeriksa dapat terus ditingkatkan.

Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 27 Rajab 1430 H tersebut diikuti oleh keluarga besar Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI mulai dari pegawai, tenaga kontrak hingga keluarganya. Solidaritas tinggi ditunjukkan oleh pegawai non muslim. Walaupun tidak ikut memperingati tetapi mereka dengan sukarela membantu persiapan dan kelancaran kegiatan tersebut. (ron)

Diklat Program Jamkesmas Perwakilan Provinsi Sulteng (21– 25 Juli 2009)

Sub Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI selama lima hari, Selasa-Sabtu (21-25/7), menyelenggarakan Diklat Pemeriksaan Tematik Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang bertempat di Aula Perwakilan. Diklat tersebut diikuti oleh pemeriksa pada Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah yang menghadirkan pemateri dari intern dan ekstern BPK.

Hadir sebagai pemateri dari ekstern BPK antara lain Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, **Dr. Anshayari Arsyad, M. Kes.**, Kepala PT. Askes (Persero) Cabang Palu, **T. be. Ng. Maserang** dan wakil dari RSUD UNDATA Palu, **Dr. Wardana M. Harun, Sp. PK**. Sedangkan yang membawakan materi dari intern BPK yaitu Kepala Seksi Sulteng IIB, **I Kadek Suartama, S. E., M. Ak., Ak.**

Kepala Sekretariat Perwakilan yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia, **Ruslan, S. E., M. M.**, didampingi Kepala Sub Auditorat Sulteng II, **Muh. Yasir, S. E., M. M., Ak.**, secara resmi membuka Diklat Pemeriksaan Tematik Program Jamkesmas.

Menurut Ruslan, tujuan diselenggarakannya diklat program Jamkesmas yaitu untuk memberikan pemahaman kepada para pemeriksa tentang mekanisme Program Jamkesmas di Indonesia. Selain itu juga untuk memberikan arahan kepada para pemeriksa tentang pelaksanaan pemeriksaan Program Jamkesmas agar berjalan secara efektif dan efisien, serta untuk memberikan arahan kepada para pemeriksa tentang pelaporan hasil pemeriksaan Program Jamkesmas.

“Secara umum ada tiga materi pokok yang disampaikan dalam diklat ini yaitu mengenai selayang pandang tentang pelayanan kesehatan di Indonesia, program Jamkesmas dan pemeriksaan program Jamkesmas,” jelas Ruslan.

Diklat Pemeriksaan Tematik Program Jamkesmas secara resmi ditutup oleh Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI, **Dadang Gunawan**, Sabtu (25/7). Menurut Dadang, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk perwakilan yang melakukan pemeriksaan pendahuluan program Jamkesmas karena pemeriksaan pendahuluan hanya dilakukan di dua perwakilan.

Beliau berharap diklat ini bisa dijadikan bekal bagi pemeriksa yang dalam waktu dekat akan diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan program Jamkesmas. Bagi pemeriksa yang tidak diterjunkan, setidaknya diklat ini bisa dijadikan tambahan pengetahuan yang berharga. (***)



(Kepala Dinas Kesehatan Prov. Sulteng sedang memberikan materi “Selayang Pandang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Miskin.”)



(Peserta diklat nampak serius dalam mengikuti materi yang disajikan)

PERINGATAN 17 AGUSTUS



perlombaan tersebut adalah penunjang satu yang merupakan gabungan dari Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Sekretariat Kepala Perwakilan, disusul penunjang dua yang merupakan gabungan Subbag Keuangan, SDM, serta Hukum dan Humas disusul Sub Aud Sulteng I. Sementara itu juga diberikan hadiah juara lomba kepada pemenang untuk kategori perorangan.

Sebagai ungkapan rasa cinta tanah air atas proklamasi kemerdekaan ke-64 Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI mengadakan Upacara Bendera. Upacara dilaksanakan di halaman kantor perwakilan, dimulai pukul 07.30 WITA dan dihadiri oleh segenap pegawai di lingkungan perwakilan serta dipimpin oleh Kepala Perwakilan, **Dadang Gunawan**.

Selaku Inspektur Upacara Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan amanat dari Ketua BPK RI, Anwar Nasution kepada seluruh pegawai.

Dalam upacara tersebut juga diberikan penganugerahan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kepada **Sdr. I Kadek Suartama, SE, M.Ak**, berupa Satya Lancana Karya Satya 10 tahun.

Selesai upacara, dilanjutkan dengan pembagian hadiah bagi juara lomba. Ada berbagai macam lomba yang digelar untuk memperingati HUT RI tahun ini. Perlombaan tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu untuk kelompok dan perorangan. Untuk kategori kelompok yakni Futsal, Bola Voli, dan Tenis Meja. Sedangkan untuk kategori perorangan dilakukan lomba Lari Karung dan pertandingan domino.

Lomba tidak hanya melibatkan pegawai tetapi juga keluarga serta putra-putri pegawai yang masih balita. Sebagai juara umum untuk pertandingan kelompok dalam



(ki-ka : Kasubaud Sulteng I, Kasubag Umum, Kepala Perwakilan, Kasetlan)

Sebelumnya, pada Jumat (14/8), diadakan gerak jalan sehat yang diikuti seluruh pegawai dan keluarganya. Gerak jalan yang mengambil start dan finish di halaman kantor Perwakilan ini dilepas oleh Kepala Perwakilan pada pukul 06.30 WITA. Adapun rute yang ditempuh yaitu sepanjang 4 km dengan menyusuri jalan-jalan utama di kota Palu. Selesai acara gerak jalan dimeriahkan dengan pembagian *door prize* yang diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan kepada pegawai atau keluarga pegawai yang beruntung. (agt)



Tips Atasi Stres



Orang stres kini semakin bertambah. Ditambah dengan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), harga kebutuhan pokok yang melonjak, atau banyaknya kerjaan yang menumpuk di kantor. Ada beberapa tips yang dapat Anda lakukan:

1. Energi positif

Keluarkan energi positif di dalam diri kita dengan berpikiran optimistis dalam menghadapi setiap permasalahan. Sadarilah bahwa setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Bersikaplah lebih fleksibel sehingga kita dapat lebih menikmati indahnya hidup.

2. Jaga kesehatan

Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jagalah kesehatan tubuh dengan berolahraga teratur, tidur yang cukup, dan mengonsumsi makanan yang bergizi.

3. Kendalikan emosi

Cara termudah untuk mengendalikan emosi adalah dengan minum air putih yang banyak saat emosi memuncak. Air putih dapat menenangkan emosi dan membantu kita berpikir lebih jernih. Emosi yang berlebihan justru dapat menjadi pemicu terjadinya stres.

4. Istirahat sejenak

Luangkan sedikit waktu untuk beristirahat. Gunakanlah akhir pekan dengan baik, khususnya untuk memanjakan diri dan keluar dari rutinitas sehari-hari. berkumpul bersama keluarga atau teman-teman merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan energi positif serta semangat baru.

5. Terbuka

Jangan pendam masalah kita sendirian. Silahkan berbagi cerita kepada orang yang dipercaya. Setelah mengeluarkan masalah, beban akan terasa lebih ringan dan tidak mengendap di dalam pikiran.

6. Tingkatkan humor

Secara klinis, humor dapat digunakan untuk mengatasi rasa stres. Di Indonesia, sekarang ini sudah tersedia terapi tertawa yang biasa dilakukan minimal lima orang, selam 5 - 10 menit. Humor memang perlu dilakukan agar syaraf tidak terlalu tegang dan tubuh dapat berelaksasi.

Sumber: <http://www.mediahidupsehat.com/>

PROFIL KITA

Makmun Fuad, S.E., M.Sc., Ak.



'CERMIN AYAH SAYANG KELUARGA'

"Profil Kita" untuk Ebony edisi kali ini adalah **Makmun Fuad, S.E., M.Sc., Ak.** Lahir di Surakarta tanggal 2 Juni 42 tahun silam dari keluarga Mahmud Fauzi. Jebolan dari *Birmingham University* yang pada saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Auditorat Sulteng I Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI ini adalah sosok yang sabar, religius, dan sederhana. *Joke-joke* kental sering keluar dari sosok yang dalam kesehariannya terlihat serius tersebut.

Awal menapaki karir di BPK RI dimulai sejak bulan Maret 1996 pada Perwakilan II Yogyakarta (sekarang Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta BPK RI) dengan bermoldakan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada yang menjadi bekal berharga baginya. Ditambah pengalaman-pengalaman *internasional* di awal karirnya antara lain mengikuti program "*Secondment*" di New Zealand pada tahun 1997 dan dilanjutkan dengan studi S2 di *Birmingham University* dengan Program Studi *Accounting and Finance* pada tahun 1999 sehingga beliau menjadi sosok seperti sekarang ini.

Imbas dari hasil usaha keras yang dipainya tersebut maka pada tanggal 9 September 2004 beliau dipercaya mengemban tugas sebagai Kepala Seksi Jatim II B pada Perwakilan Yogyakarta. Satu tahun berselang, yakni setelah Perwakilan BPK RI di Surabaya (sekarang Perwakilan Provinsi Jawa Timur BPK RI) diresmikan pada akhir tahun 2005, beliau terpaksa harus meninggalkan keluarga dan hijrah ke Surabaya dengan posisi sebagai Kepala Seksi Jatim V. Pada tanggal 13 November 2007 kembali beliau harus meninggalkan keluarganya. Namun, kali ini lebih jauh ke seberang pulau menuju Sulawesi Tengah untuk menduduki posisi jabatan sekarang ini.

Ayah 2 orang anak hasil perkawinannya dengan Mardiyah Agung, S.Ag., M.Pdi ini

merupakan profil yang sayang keluarga. Merupakan satu hal yang tidak disukai beliau ketika harus berpindah-pindah tugas dan jauh dari keluarga. Beliau memiliki komitmen untuk berusaha memanfaatkan waktu kosong yang ada untuk sekedar dapat berkumpul dengan keluarganya, walaupun konsekuensi jarak Palu-Surakarta dan tugas menggunung harus dilakoni sosok pria 42 Tahun tersebut.

Sosok penghobi bulu tangkis yang senang menghabiskan masa luangnya dengan membaca buku ini berpegang pada motto hidup 'Bekerja adalah Ibadah'. Beliau memiliki prinsip bahwa hidup biarkan mengalir begitu saja, sehingga tak heran jika beliau tidak memiliki cita-cita yang spesifik di masa kecilnya.

Pada akhir sesi wawancara, beliau juga berpesan kepada para pegawai BPK RI, khususnya pegawai Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah agar senantiasa mengasah pengetahuan dan kemampuannya agar dapat lebih maju dan berpredikat standar internasional. Jangan sampai kita ketinggalan dengan auditor negara lain. *Terutama Malaysia,, Ya kan pak....??* (wwn)

HUMOR

Tiga jendral besar sedang berkumpul di kapal induk militer AS yg sedang berlayar di laut lepas, ketiganya berasal dari negara yg berbeda dan sedang menyombongkan kehebatan pasukan negaranya masing2.

Jendral pertama yg dari Rusia memanggil anak buahnya, kemudian anak buahnya itu disuruh berenang keliling kapal, lalu setelah selesai jendral Rusia berkata:

"Lihat kan prajurit kami, walaupun banyak hiu tapi dia tetap berani menantang bahaya"

Jendral AS gak mau kalah, dia panggil anak buahnya dan disuruh berenang keliling kapal 5x, setelah selesai dia pun membanggakan prajuritnya yg lebih berani dari prajurit Rusia.

Jendral Indonesia pun gak mau kalah, dia panggil anak buahnya dan disuruh keliling kapal 10 x. Tiba2 anak buahnya berteriak pada jendralnya : "Pak, lo bego apa udah gila? Ini kan banyak hiunya, tolo!" lalu anak buahnya langsung pergi.

Jendral Indonesia senyum2 sumringah dan berkata sama ke-2 jendral lainnya: "Liat tuh, berani kan? Mana ada anak buah lo yg berani membangkang dan ngatain atasannya?" (***)

SELAMAT YA...

Kru **Eboni** mengucapkan “Selamat ulang tahun, semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan.”

Dhenny Septiadi (1 September)
Suryadi Wawan Kurniawan (8 September)
M. Syazili (14 September)
Kasman Tolidunde (19 September)
Kortina Gultom (29 September)
Agus Prastyo (1 Oktober)
Wawan Dwi Margono (3 Oktober)
Andi Achmad Kosasih (6 Oktober)
Hendra Kusuma (30 Oktober)
Nanang Budi Cahyono (30 Oktober)
Ibrahim Almahdali (18 November)
Mayacipta N.P (20 November)

Kru **Eboni** mengucapkan selamat atas kelahiran putra ke-1 kepada:

Diah Nursanti
“Aqeela Nuraldifa Zulsafaraz”
(26 Mei 2009)

M. Syazili
“M. Adam Hayin”
(25 Juni 2009)

Hendy Ramadhani Nugraha
“Muhammad Haidar Alfarezel”
(4 Juli 2009)

Agustinus Triyonojati + Purwaningrum H.C
“Daniel Evan Pradana”
(31 Agustus 2009)

“Semoga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Amin”

Kru **Eboni** mengucapkan “Selamat menempuh hidup baru, semoga langgeng dan bahagia selalu” atas pernikahan:

M. Hammam + Mita Cahyani
(6 Juni 2009)

Sri Kasembadan W.P + Arifah Fidyah U.
(11 Juli 2009)

M. Sholichuddin + Yuyun Oktavia
(18 Juli 2009)

Titis Imanda + R. Visynu Budhi Setiawan
(18 Juli 2009)

Agenda Perwakilan

Diklat Ke-PU-an akan diselenggarakan tanggal 5 s.d. 9 Oktober 2009.

Dialog Publik dengan kalangan akademisi akan diselenggarakan tanggal 15 Oktober 2009.

Galeri Foto Perwakilan



Keterangan Foto:

1. Konsultasi DPRD Kota Palu dalam rangka pembahasan Ranperda Penyertaan Modal yang diterima oleh Kepala Perwakilan, tanggal 12 Juni 2009
2. Pemberian Keterangan Ahli kasus PDAM Motanang Buol oleh Faisal Hendra, SE, MM, Ak (Kasie Sulteng IB) di PN Buol, tanggal 25 Juni 2009
3. Gelar Perkara Polda Sulteng atas temuan Perwakilan Prov. Sulteng BPK RI, tanggal 3 Juli 2007
4. Suasana diklat Jamkesmas, tanggal 21-25 Juli 2009



5. Kunjungan mahasiswa Universitas Tadulako yang diterima oleh Kepala Sub Auditorat Sulteng I, tanggal 29 Juli 2009
6. Konsultasi DPRD Kabupaten Poso atas temuan BPK yang diterima oleh Kepala Perwakilan, tanggal 29 Juli 2009
7. Buka bersama keluarga besar Perwakilan Prov. Sulteng, tanggal 1 September 2009
8. Kunjungan Pejabat Struktural BPKP Provinsi Sulteng yang diterima oleh Kepala Perwakilan, tanggal 3 September 2009

Eboni

Penanggungjawab Ruslan Redaktur Agus (agt) Penyunting/Editor Rony (ron), Wawan (wwn) Redaktur Pelaksana

Hendra (hd), Jemmy (jm) Desain Grafis dan Fotografer Ucup (yk), Hendy (hdy) Sekretariat Tina (tin), Wikan (wkn)

Alamat Redaksi Sub Bagian Hukum dan Humas Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah BPK RI; Telp. (0451) 486622 Ext. 118; Fax (0451) 486633; e-mail : hukumhumas.sulteng@yahoo.com

Redaksi menerima kiriman berita, artikel atau informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan dan kegiatan ke-BPK-an lainnya. Bagi tulisan yang dimuat akan mendapatkan souvenir cantik. Untuk kritik, saran dan segala uneg-uneg tentang permasalahan yang ada di Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, silakan email atau sampaikan ke redaksi Eboni.

